

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pendapatan dalam Akuntansi

3.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pendapatan menurut Akuntansi memiliki cukup banyak konsep yang diperoleh dari berbagai teori akuntansi. Ilmu akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan terarah. Pada dasarnya, pengertian pendapatan menurut Akuntansi dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yaitu:

1. Konsep Pendapatan yang memusatkan pada arus masuk (*inflow*) aktiva sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai *inflow of net asset*.
2. Konsep Pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya, jadi pendekatan ini menganggap pendapatan sebagai *outflow of good and services*.

Untuk mengetahui pengertian pendapatan, kita juga bisa melihat pengertian pendapatan menurut para ahli. Menurut Zaki Baridwan (2010:5) dalam buku *intermediate accounting*, menyebutkan bahwa :

“Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha”.

Dari pernyataan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya (penjualan produk dan/atau jasa) kepada pelanggan.

3.1.1.2 Sumber Pendapatan

Pendapatan dapat dibedakan kan menjadi dua sumber, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional dan sumber pendapatan yang berasal dari kegiatan non operasional.

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk, atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.

Pendapatan operasional berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Pendapatan operasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Penjualan kotor yaitu semua hasil penjualan barang atau jasa sebelum dikurangi dengan potongan yang menjadi hak pembeli.
- Penjualan bersih yaitu hasil penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya potongan yang menjadi hak pembeli.

2. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu, tetapi bukan diperoleh dari kegiatan utama atau operasional perusahaan (di luar usaha

pokok). Pendapatan non operasional diperoleh dari kegiatan sampingan yang bersifat insidental.

Pendapatan non operasional dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu:

- Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain.
Contohnya pendapatan bunga, sewa, dan royalti.
- Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang dagangan atau hasil produksi.
Contohnya penjualan surat-surat berharga dan penjualan aktiva tak berwujud.

3.1.1.3 Proses Pembentukan Pendapatan

Terdapat dua konsep yang erat hubungannya dengan proses pendapatan, yakni konsep proses pembentukan pendapatan (*earning process*) dan proses realisasi pendapatan (*realization process*).

1. Proses Pembentukan Pendapatan (*Earnings Process*)

Proses pembentukan pendapatan (*earning process*) adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil akan selalu memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Kegiatan operasi yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah kegiatan yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengumpulan piutang.

2. Proses Realisasi Pendapatan (*Realization Process*)

Proses realisasi pendapatan (*realization process*) adalah proses pendapatan yang terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Proses realisasi pendapatan (*realization process*) dimulai sejak tahap terakhir kegiatan produksi yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan.

3.1.1.4 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Untuk menyusun sebuah laporan keuangan, dibutuhkan suatu pedoman dasar penilaian untuk mengetahui berapa rupiah yang dapat diperhitungkan dan dicatat sebagai suatu transaksi serta berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan dalam laporan keuangan. Setidaknya terdapat empat dasar dalam penilaian pendapatan, yaitu:

1. Biaya Historis (*Historical Cost*)

Biaya historis (*historical cost*) merupakan aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.

2. Biaya Kini (*Current Cost*)

Biaya kini (*current cost*) merupakan aktiva dinilai dalam wujud kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang.

3. Nilai Realisasi atau Penyelesaian (*Realization/Settlement Value*)

Nilai realisasi atau penyelesaian (*realization/settlement value*) merupakan aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang

sama atau setara aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (*orderly disposal*).

4. Nilai Sekarang (*Present Value*)

Nilai sekarang (*present value*) merupakan aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

Sejumlah perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Laba sendiri merupakan kelebihan pendapatan atas beban pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk bisa menghasilkan laba, suatu perusahaan harus memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan beban yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah hasil penerimaan dana yang dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima ataupun yang dapat diterima.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23, nilai wajar yang dimaksud adalah jumlah dimana suatu aset dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Menurut PSAK 23, pendapatan dapat timbul melalui peristiwa-peristiwa ekonomi berikut ini:

1. Penjualan barang
2. Penjualan jasa
3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

Berikut ini adalah berbagai macam dasar pengukuran pendapatan antara lain:

1. *Cash Equivalent*

Jumlah rupiah kas penghargaan produk yang terjual baru akan menjadi pendapatan yang sepenuhnya setelah produk yang terjual baru akan diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi.

2. Nilai Setara Kas

Jumlah rupiah kas yang diperkirakan, diterima, dibayarkan pada masa mendatang dari hasil penjualan aktiva dalam kegiatan normal perusahaan.

3. Harga Dibawah Harga Pasar

Harga pasar yang berlaku sekarang tetap dan nilainya dibawah harga semula.

4. Harga Pasar

Harga jual bersih yang diperkirakan dikurangi biaya simpanan, biaya penjualan, dan biaya penyerahan produk.

5. Harga Kesepakatan

Harga dimana terjadi kesepakatan antara penjual dengan pelanggan dari setiap jumlah rupiah penjualan yang disepakati dengan pelanggan.

Secara umum, terdapat dua kriteria pendapatan yang dapat dijadikan pedoman dalam pengakuan pendapatan:

1. Telah Direalisasi (*Realized*)

Pendapatan akan diakui apabila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Dengan kata lain, pendapatan akan diakui setelah adanya kepastian akan segera terealisasi (*realizable*), dimana barang hasil pertukaran dapat segera diubah (dikonversi) menjadi kas atau klaim untuk menerima kas. Syarat barang yang mudah dikonversi adalah:

- Memiliki harga per unit yang pasti dan barang tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran barang, misalnya emas.
- Mudah dijual tanpa memerlukan biaya yang besar.

2. Pendapatan Telah Terbentuk

Pendapatan akan diakui apabila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai.

3.1.2 Pendapatan dalam Pemerintah

3.1.2.1 Pengertian Pendapatan

Pengertian Pendapatan dalam Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut :

“Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.”

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari kedua definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah.

3.1.2.2 Sumber Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua unsur penting dalam pengertian/konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaannya sepenuhnya oleh daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pasal 3 huruf (a), sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom

lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan. Pendapatan tranfer ini terdiri dari:

- Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan persentase tertentu untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil ini terdiri dari DBH Pajak (PBB, BPHTB, dan PPh Perorangan) dan DBH Sumber Daya Alam (kehutanan, Pertambangan umum, perikanan, Pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi).
- Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

- Dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota.
- Dana penyesuain dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dari kelompok pendapatan di atas, hanya Pendapatan Asli Daerah yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan dua kelompok pendapatan lainnya hanya ada di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Beberapa ketentuan Penerimaan Pendapatan Daerah adalah:

1. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
2. Semua pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3. SKPD dilarang memungut pendapatan selain sesuai dengan kewenangannya yang diatur berdasarkan Perda.
4. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lainnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang merupakan pendapatan daerah.
5. Pengembalian atas kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
6. SKPD dilarang menggunakan langsung pendapatan untuk membiayai pengeluaran/belanja, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

3.1.2.3 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam

catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Selanjutnya pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu :

- Pendapatan Menurut Basis Kas

Diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara atau daerah oleh entitas pelaporan.

- Pendapatan Menurut Basis Akrua

Diakui pada saat timbulnya hal atas pendapatan tersebut.

Meskipun sampai saat ini pendapatan diakui dengan basis kas, namun SAP juga telah mencantumkan pengakuan pendapatan dengan basis akrual. Pendapatan diakui dengan asas bruto. Segala biaya yang langsung mengurangi jumlah yang diterima tidak menjadi pengurang dalam melakukan pencatatan biaya tersebut akan dicatat sebagai belanja di tahun anggaran yang sama.

Akuntansi Pendapatan SKPD Entitas akuntansi, dalam hal ini SKPD melakukan akuntansi pendapatan sebagai berikut:

1. Transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.
2. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga.
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai

pengurang pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di SKPD ini antara lain :

- Surat Tanda Setoran (STS)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- Surat tanda bukti pembayaran
- Surat tanda bukti penerimaan lainnya.

3.1.3 Analisis Pendapatan

3.1.3.1 Pengertian Analisis Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas umum pemerintah daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintahan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan.

Manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah.

3.1.3.2 Macam-macam Analisis Pendapatan

Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah antara lain :

1. Analisis Varian (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu penggunaan laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah dilakukan dengan cara menghitung persentase realisasi pendapatan tahun berjalan dengan periode-periode sebelumnya. Analisis pertumbuhan daerah terdiri atas analisis :

- a. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
- b. Pertumbuhan Pajak Daerah
- c. Pertumbuhan Retribusi Daerah
- d. Pertumbuhan Pendapatan Transfer

3. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan tersiri atas analisis :

- a. Rasio Kemandirian Daerah
- b. Rasio Ketergantungan Daerah
- c. Derajat Desentralisasi
- d. Rasio Efektivitas PAD
- e. Rasio Efisiensi PAD
- f. Rasio Efektivitas Pajak Daerah
- g. Rasio Efisiensi Pajak Daerah
- h. Derajat Kontribusi BUMD
- i. Rasio Kemampuan Mengembalikan Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*)

- j. Rasio Pendapatan Terhadap Uang
- 4. Menilai Potensi Penerimaan Daerah yang masih dapat dioptimalkan
 - Menilai potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan, terdiri atas analisis :
 - a. Potensi Pajak Daerah
 - b. Potensi Retribusi Daerah

Untuk menghitung angka pertumbuhan pendapatan daerah dan analisis penerimaan daerah, informasi dari laporan realisasi anggaran saja sudah mencukupi, tetapi untuk menghitung rasio keuangan tertentu perlu didukung informasi keuangan lainnya misalnya neraca dan data statistik lainnya.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Analisis Pendapatan pada Balai Benih Ikan

Balai Benih Ikan terletak di jalan Raya Semarang – Boja, Mijen Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ini mempunyai luas sekitar 2 hektare. Didalam Balai Benih Ikan terdapat kolam untuk pembenihan, pembesaran dan juga tempat penelitian. Balai Benih Ikan masih menggunakan sistem penjualan tunai dalam proses operasinya dan termasuk pada pendapatan jenis operasional karena Balai Benih Ikan mempunyai kegiatan usaha menjual barang dagangan yaitu benih ikan. Dan termasuk dalam Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), karena hasil penjualan (pendapatan) Balai Benih Ikan dialokasikan ke dalam kas daerah.

Pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang nomor 34 tahun 2015 :

Pasal 1

(10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

(33) Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

(35) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Transaksi pendapatan Balai Benih Ikan dicatat petugas petanausahaan keuangan pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan dan kemudian disetor ke kas daerah.

3.2.2 Catatan Akuntansi yang Digunakan

Catatan akuntansi yang digunakan oleh UPTD Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Semarang adalah sebagai berikut:

a. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal penerimaan kas dibuat oleh bagian keuangan untuk mencatat penerimaan kas yaitu berdasarkan bukti setor bank.

UPTD Balai Benih Ikan Mijen JL. Semarang- Boja, Mijen Semarang							
JURNAL PENERIMAAN KAS						Halaman :	
Tgl	Keterangan	No.bukti	Kas		Penjualan tunai	Lain-lain	
			Debet	Kredit		Kredit	No.rek
18							
J							

Gambar 3.2.2 (a) Jurnal Penerimaan Kas UPTD Balai Benih Ikan

b. Jurnal Umum

Jurnal umum dibuat oleh bagian keuangan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual.

UPTD Balai Benih Ikan Mijen Jl. Boja- Semarang,Mijen					
JURNAL UMUM					
Tanggal		Keterangan	Ref	Debet	Kredit
G a m b					

a

Gambar. 3.2.2 (b) Jurnal Umum UPTD Balai Benih Ikan

c. Kartu Persediaan

Kartu persediaan dibuat oleh bagian keuangan untuk mencatat harga pokok barang yang dijual.

UPTD Balai Benih Ikan Mijen Jl. Boja- Semarang, Mijen														
KARTU PERSEDIAAN														
Pembelian				Penerimaan				Penjualan				Saldo		
Tgl	Kuan Titas	Hrg sat	Jml hr	Tgl	Kuan Titas	Hrg sat	Jml Hr g	Tgl	Kuan titas	Hrg sat	Jml Hr g	kuan titas	Hrg Sat u	Jml Hr g

Gambar 3.2.2 (c) Kartu Persediaan UPTD Balai Benih Ikan

3.2.3 Perhitungan Pendapatan pada Balai Benih Ikan

Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan pendapatan Balai Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kote Semarang, berikut pembahasannya :

1. Meninjau pendapatan yang diperoleh Balai Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kota Semarang periode 2016 setiap bulan.
 - a. Berikut tabel data penjualan ikan berdasarkan jenis ikan tahun 2016 :

Bulan	Nilai Penjualan Per Jenis Ikan (Rp)			Jumlah (Rp)
	Karper	Lele	Nila	
Januari	587.500	855.000	562.500	2.005.000
Februari	617.500	720.000	687.500	2.025.000
Maret	545.000	810.000	720.000	2.075.000
April	685.000	780.000	687.000	2.150.000
Mei	657.500	1.020.000	857.500	2.536.000
Juni	830.000	990.000	930.000	2.750.000
Juli	865.000	1.140.000	1.020.000	3.025.000
Agustus	805.000	1.050.000	1.075.000	2.930.000
September	760.000	930.000	860.000	2.550.000
Oktober	740.000	750.000	945.000	2.435.000
November	675.000	705.000	840.000	2.220.000
Desember	1.045.000	1.590.000	790.000	3.425.000
Total				30.125.000

Sumber: Bagian Penjualan Balai Benih Ikan

- b. Berikut tabel pendapatan UPTD Balai Benih Ikan tahun setiap bulan 2016 :

Triwulan	Bulan	Pendapatan
Triwulan I (Satu)	Januari	Rp. 2.005.000

Triwulan I (Satu)	Februari	Rp. 2.025.000
Triwulan I (Satu)	Maret	Rp. 2.075.000
Triwulan II (Dua)	April	Rp. 2.150.000
Triwulan II (Dua)	Mei	Rp. 2.536.000
Triwulan II (Dua)	Juni	Rp. 2.750.000
Triwulan III (Tiga)	Juli	Rp. 3.025.000
Triwulan III (Tiga)	Agustus	Rp. 2.930.000
Triwulan III (Tiga)	September	Rp. 2.550.000
Triwulan IV (Empat)	Oktober	Rp. 2.435.000
Triwulan IV (Empat)	November	Rp. 2.220.000
Triwulan IV (Empat)	Desember	Rp. 3.425.000
Total Pendapatan		Rp. 30.125.000

Sumber : Bagian Keuangan Balai Benih Ikan

- c. Berikut tabel pendapatan UPTD Balai Benih Ikan setiap triwulan tahun 2016 :

Triwulan	Pendapatan
Triwulan I (Satu)	Rp. 6.105.000
Triwulan II (Dua)	Rp. 7.436.000
Triwulan III (Tiga)	Rp. 8.505.000
Triwulan IV (Empat)	Rp. 8.080.000
Total	Rp. 30.125.000

2. Menghitung persentase kenaikan atau penurunan pendapatan yang terjadi pada Balai Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kota Semarang setiap triwulan, dengan rumus :

$$\% = \frac{\text{Jumlah Pendapatan Akhir} - \text{Jumlah Pendapatan Awal}}{\text{Jumlah Pendapatan Awal}}$$

a. Menghitung persentase kenaikan atau penurunan Balai Benih Ikan setiap triwulan:

$$\begin{aligned} - \text{ Triwulan II (Dua)} &= \frac{\text{Rp. 7.436.000} - \text{Rp. 6.105.000}}{\text{Rp. 6.105.000}} \\ &= 0,22 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \text{ Triwulan III (Tiga)} &= \frac{\text{Rp. 8.505.000} - \text{Rp. 7.436.000}}{\text{Rp. 7.436.000}} \\ &= 0,14 \% \end{aligned}$$

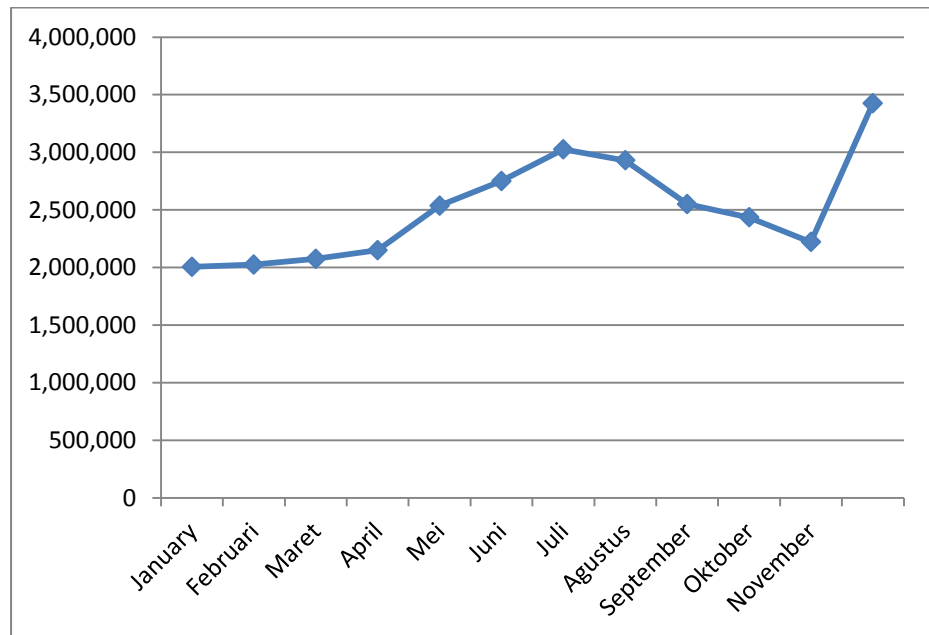
$$\begin{aligned} - \text{ Triwulan IV (Empat)} &= \frac{\text{Rp. 8.080.000} - \text{Rp. 8.505.000}}{\text{Rp. 8.505.000}} \\ &= 0,05 \% \end{aligned}$$

b. Tabel persentase kenaikan atau penurunan

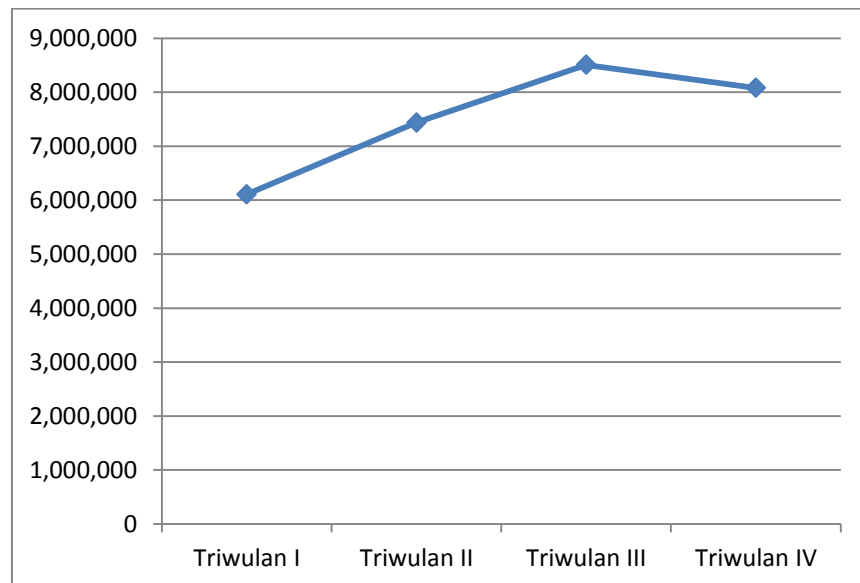
Triwulan	Persentase
Triwulan I	-
Triwulan II	0,22 %
Triwulan III	0,14 %
Triwulan IV	0,05 %

3. Menganalisa adanya kenaikan atau penurunan pendapatan yang terjadi di Balai Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kota Semarang setiap bulan.

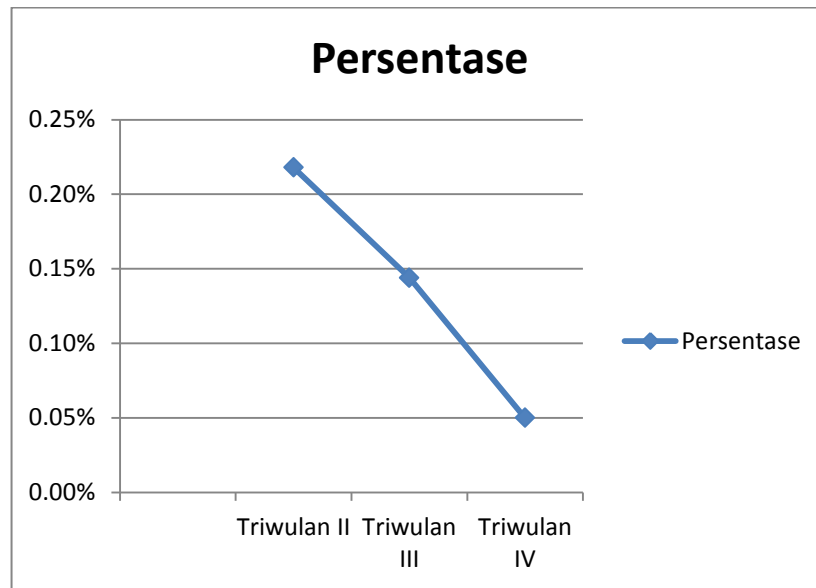
a. Grafik Pendapatan UPTD Balai Benih Ikan tiap bulan 2016



b. Grafik Pendapatan UPTD Balai Benih Ikan tiap triwulan 2016



c. Grafik Persentase Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Balai Benih Ikan tahun 2016



4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan pendapatan Balai Benih Ikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kota Semarang
- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pendapatan pada Balai Benih Ikan adalah sebagai berikut :
 - Iklim yang tidak menentu
Iklim yang berubah-ubah menyebabkan jumlah benih ikan yang akan dipanen menjadi rusak.
 - Kurangnya sumber daya manusia
Kurangnya pekerja tetap yang ada di Balai Benih Ikan menyebabkan kurang produktifnya memproses benih ikan.
 - Kurangnya minat masyarakat akan ikan
Ikan dikalangan masyarakat pada saat ini telah tergantikan dengan daging atau makanan kaleng.
 - b. Hal yang dilakukan Balai Benih Ikan (Dinas Perikanan) untuk meningkatkan pendapatan adalah sebagai berikut :
 - Memberikan vitamin pada benih-benih ikan

Karena iklim yang sering berubah-ubah yang mengakibatkan benih ikan rusak maka menambahkan vitamin dapat mengurangi kerusakan benih ikan tersebut'

- Melakukan promosi sehatnya mengkonsumsi ikan.

Dilakukannya promosi kepada masyarakat tentang sehatnya mengkonsumsi ikan.